

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Ed.2, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Basah, Sjahran. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Ed. 1. Cet. 8 Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Farida Indrati Soeprapto, Maria. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Hamid S. Atamimi, A. *Perbedaan Antara Peraturan Peundang-Undangan dan Peraturan Kebijaksanaan*. Jakarta: Makalah Pidato dies Natalis PTIK ke-46, 1992.

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Ed. Revisi. 7 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: UII Press, 2002.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 7. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Huda, Ni'Matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012.

M. Hadjon, Philips. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

M. Hadjon, Philips. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-co, 1992.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2005.

Muchsan. *Beberapa catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrsi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Prins, WF dan R. Kosim Adisapoetra. *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Eresco, 1983.

- Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Saiful Bahri, T, Hessel Nogi S. Tangkilisan dan Mira Subandini. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Michigan: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2004.
- SF, Marbun dan Moh. Mahfud. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Sitorus, Oloan dan Dayat Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, 2004.
- Soehino. *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1. Cet. 10. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ed. 1. Cet. 12. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- SW. Sumardjono, Maria. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1998.

MAKALAH

- Basah, Sjachran. "Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi." Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995.
- Basah, Sjachran. "Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan." Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Lagal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, Jakarta, 1-2 Mei 1996.

S.W Soemardjono, Maria. "Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, Sebuah Catatan Untuk Makalah Chadidjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut Upa." Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agrarian Iii Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara-Badan Pertanahan Nasional, Medan, 19-20 September 1990.

PERATURAN/UNDANG-UNDANG

Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Indonesia, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam.

INTERNET

Batam Menuju Kota Ramah Lingkungan yang Nyaman,

<http://batampos.co.id/21-06-2014/105672/>. diunduh 6 Juni 2015.

Supir Taxi se-Batam Geruduk Batam Center,

<http://batam.tribunnews.com/2012/07/31/supir-taxi-se-batam-geruduk-batam-center>, diunduh 09 Desember 2015.

Persetujuan Prinsip,

<http://perijinan.slemankab.go.id/index.php?mod=license&sub=LicenseDetailPO&act=view&typ=html&izin=170>, diunduh 20 Desember 2015.

Konsep Negara Hukum, https://www.academia.edu/8267109/Konsep_Negara_Hukum, diunduh 21 Desember 2015.

Teori Kesejahteraan Negara, https://www.academia.edu/8834367/BAB_IX_TEORI-

[TEORI_KESEJATERAAN_NEGARA](https://www.academia.edu/8834367/BAB_IX_TEORI-), diunduh 21 Desember 2015.

Pengertian Fungsi dan asas-asas pemerintahan,

<http://dianchocho.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas-pemerintahan.html>, diunduh 21 Desember 2015.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22818/4/Chapter%20II.pdf>, diunduh 24 Desember 2015.

Pengertian asas kepastian hukum menurut para ahli,
<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, Diunduh 20 Januari 2016.